

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang amat serius, harus ada suatu langkah-langkah yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan serta untuk tetap mempertahankan kondisi tersebut.

Akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi perkapita yang dirangsang oleh kenaikan pendapatan rumah tangga, maka kebutuhan beras terus mengalami peningkatan. Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, produksi beras nasional harus meningkat secara memadai dalam rangka mempertahankan kecukupan pangan. Peningkatan produktivitas padi tersebut merupakan faktor utama bagi peningkatan produksi beras nasional. pertumbuhan produksi bersumber dari dua faktor.(a) pertambahan areal panen, dan (b) peningkatan produktivitas. Akan jadi suatu persoalan yang besar bila terjadi penurunan areal panen, karena tingginya permintaan lahan yang berimbas pada pengubahan fungsi lahan sawah. Bila sawah yang menjadi target konversi berupa sawah yang sudah mantap, mengakibatkan produktivitas lahan berkurang akibat lahan area yang berkurang serta dapat pula hasil panen yang berkurang.

Adiningsih (1996) dan Asyik (1996) berpendapat bahwa pemantapan ekosistem sawah baru membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Sebaliknya areal sawah produktif yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap produksi pangan justru telah mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian. Gejala ini terutama terjadi di Jawa yang merupakan produsen utama komoditi pangan di tingkat nasional. Oleh karena itu, meskipun secara agregat luas areal baku tanaman pangan dapat meningkat akibat pencetakan sawah baru, namun areal tanaman pangan cenderung menurun secara kualitas. Dengan demikian, masalah pengadaan pangan akan semakin kompleks di masa yang akan datang yang dicirikan dengan menyusutnya lahan baku tanaman pangan, dan semakin terbatasnya anggaran pemerintah untuk memacu peningkatan produksi Beras. Di satu sisi kebutuhan pangan terutama beras terus meningkat akibat pertambahan penduduk dan peningkatan daya beli. Dalam situasi tersebut upaya

untuk mengurangi “kehilangan produksi pangan” yang terjadi akibat alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi penting guna mengimbangi stagnasi pertumbuhan produksi pangan. Dalam konteks inilah upaya “perlindungan” atas lahan tanaman pangan merupakan alternatif yang harus diperhitungkan. Walaupun upaya tersebut cukup sulit diharapkan dapat memacu peningkatan produksi pangan tetapi kebijakan reservasi lahan pertanian tanaman pangan yang tertata dengan baik diharapkan akan mampu menekan laju “kehilangan produksi pangan” yang terjadi akibat konversi lahan tanaman pangan kepenggunaan non pertanian.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, laju konversi lahan, tahun 1999-2002 rata-rata 110.000 hektar pertahun. Jika rata-rata produktivitas perhektar 4,61 ton gabah kering giling, dan dalam satu tahun produksi GKG nasional berkurang 507.100 ton, atau setara 329.615 ton beras, akibat konversi lahan. Dengan demikian, sepanjang tahun 1999-2002 (4 tahun) Indonesia kehilangan potensi produksi beras nasional sekitar 1,31 juta ton dari dampak konversi lahan sawah. (Kompas, 28 April 2008)

Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan, secara garis besar ada empat masalah pokok yang akan uraikan dalam tulisan ini, yaitu :

- 1.Bagaimana perkembangan konversi lahan sawah irigasi di Indonesia?
- 2.Faktor apa saja yang mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi di Indonesia?
- 3.Bagaimana dampak konversi lahan terhadap masalah ketahanan pangan di Indonesia?
- 4.Jenis regulasi yang telah digunakan dan dapat mengendalikan konversi lahan di Indonesia?

Tujuan

Tujuan dari penulisan PKM-GT ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan konversi lahan sawah irigasi di Indonesia.
2. Mengetahui faktor apa saja mempengaruhi konversi lahan sawah di Indonesia.

3. Mengetahui dampak konversi lahan pertanian jenis irigasi teknis terhadap masalah ketahanan pangan di Indonesia.
4. Memberikan gagasan terhadap pencegahan konversi lahan irigasi teknis.

Manfaat

Penulisan PKM-GT ini dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan bagi kalangan akademisi. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

- Pemerintah dapat mempelajari solusi dalam penulisan ini dan lebih jauh lagi diharapkan dapat menerapkan solusi dengan kebijakan yang tidak merugikan dan justru mendukung pendidikan di Indonesia.
- Masyarakat akan lebih mengetahui dan mempelajari keadaan ketahanan pangan.
- Kalangan akademisi dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadikan tulisan ini sebagai bahan rujukan dalam membuat karya tulis lainnya.

TELAAH PUSTAKA

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional (UU No. 7 Tahun 1996).

Sedangkan menurut PP RI No.68 Tahun 2002, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU No. 7 Tahun 1996). Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional.

Konversi lahan sawah didefinisikan sebagai konversi lahan neto. Artinya luas lahan tahun t (L_t) adalah luas lahan tahun sebelumnya (L_{t-1}) ditambah pencetakan sawah baru (C_t) dikurangi alih fungsi lahan sawah (A_t). Secara matematika, diformulasikan sebagai berikut:

$$(C_t - A_t) = (L_t - L_{t-1})$$

Dengan demikian jika konversi lahan sawah bernilai positif, berarti hanya terjadi pencetakan sawah baru, atau pencetakan lahan sawah yang terjadi lebih luas dari alih fungsi lahan sawah masing-masing pada tahun t . Sebaliknya jika konversi lahan sawah bernilai negatif, berarti hanya terjadi alih fungsi lahan sawah atau, alih fungsi lahan sawah lebih luas dari pencetakan sawah masing-masing pada tahun t . (Ilham, *et al*)

METODE PENULISAN

Data-data yang digunakan dalam penulisan PKM-GT ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur, bacaan terkait dan data dari media elektronik. Sementara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dianalisis serta disintesis.

Latar Belakang

Pertambahan Penduduk dan Peningkatan Konsumsi, Tingginya Konversi Lahan Sawah, Persoalan Ketahanan Pangan Irigasi, Lemahnya Regulasi Pemerintah

Perumusan Masalah

Kaitan Antara Konversi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Tujuan

Menganalisis Dampak Konversi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Memberikan Gagasan Terhadap Regulasi Mengenai Konversi Lahan Pertanian

Telaah Pustaka

Pengumpulan Data Literasi, Refrensi dan Informasi

Analisis

Mengaitkan Tingkat Konversi Sawah Irigasi Terhadap Ketahanan Pangan

Sintesis

Memberikan Gagasan Terhadap Alternatif Solusi Mengenai Konversi Lahan Pertanian

Kesimpulan

Saran

ANALISIS DAN SINTESIS

ANALISIS

Perkembangan Konversi Lahan Sawah

Secara nasional sejak tahun 1979-2000 (tabel1), hanya sawah tada hujan saja yang mengalami koversi neto, yaitu seluas 319 ribu hektar atau rataan sekitar 15 ribu hektar per tahun. Namun jika dirinci berdasarkan wilayah gambarannya sebagai berikut: (1) di Jawa semua jenis irigasi mengalami konversi, dimana sawah tada hujan menduduki urutan pertama (310 ribu hektar), diikuti oleh sawah irigasi teknis (234 ribu hektar), sawah irigasi semi teknis (194 ribu hektar) dan sawah irigasi sederhana (167 ribu hektar); dan (2) untuk wilayah Luar Jawa, konversi lahan sawah yang terjadi relatif sedikit, itupun hanya pada sawah irigasi sederhana dan tada hujan di Bali dan Nusa Tenggara) dan sawah tada hujan di Kalimantan dan Sulawesi.

Khusus untuk wilayah Luar Jawa, jika dirinci konversi yang terjadi dari periode ke periode adalah sebagai berikut: (1) secara neto, hanya di Sumatera dan Sulawesi sawah irigasi teknisnya tidak pernah terkonversi, sedangkan sawah lainnya pernah; dan (2) untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan wilayah Kalimantan sawah irigasi teknisnya pernah mengalami konversi.

Temuan (tabel1) dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada tidak berjalan efektif untuk meniadakan terjadinya konversi lahan sawah beririgasi, khususnya di Jawa, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara. Namun dari kecenderungan yang terjadi di Jawa konversi lahan sawah irigasi yang cukup besar terjadi pada periode 1979-1984, menurun pada periode 1985-1996, tetapi meningkat kembali akibat tekanan krisis.

